

## DAFTAR PUSTAKA

- Adianto & As'ari, H. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Amalia, N. Q. (2017). Model Komunikasi Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar dalam menyerap aspirasi masyarakat di Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. *JOM FISIP* .
- Aminuddin. 2015. Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *e-Jurnal Katalogis*, 3(12): 132-141.
- Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009 - 2013). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Politik*.
- Cameron, K. S., & Whetten, D. A. (1996). *Organizational Effectiveness and Quality : The Second Generation*. New York, America: Agathon Press.
- Demmu, B., Patton, A., & Amin, J. (2017). Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD dalam Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *eJurnal Administrative Reform*
- Drucker, P. F. (2002). *The Effective Executive*. New York, America: Harper Collins.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations - Behavior, Structure, Prossesses* . New York, Amerika: The McGraw Hill Companies.
- Glasson, J., & Marshall, T. (2007). *Regional Planning*. New York, America: Routledge.
- Indonesia, R. (2004). Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Bappenas.
- Indonesia, R. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta, Indonesia: Kementerian Dalam Negeri.
- Indonesia, R. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Indonesia, R. (2014). Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Retrieved 2014, from hukumonline.com: hukumonline.com.
- Indonesia, U. K. (2015). Peran DPRD Jawa Barat dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*.
- Irtanto. (2008). *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. K. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang)*. (W. C. Kristiaji, Ed.) Jakarta: Erlangga.
- Negeri, K. D. (2002). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Negeri, K. D. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah.
- Negeri, K. D. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pea, R. D. (1982, Desember). What is Planning Development the Development of New Directions for Child Development
- Programme, U. N. (2009). *Handbook On Planning, Monitoring And Evaluating For Development Results*. New York, America:
- A.K. Office Supplies. Putri, Q. K., & Tinov, M. T. (2015). Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 2009 - 2014. *Reses DPRD, Members of Parliament* .
- Rahmatullah, Indra. 2013. Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*. 1(2): 215-226.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior (15th Editioned.)*. New Jersey, America: Pearson Education.
- Sedarmayanti (2013). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Setianingsih, B., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* , 1930 - 1933.

Sajaafrizal. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi (2nd Edition ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sopannah, A. (2012). *Ceremonial Budgetting : Public Participation in Development Planning at Indonesian Local Government Authority*. JAMAR

Steers, R. M. (1977). *Efektivitas Organisasi (2nd Edition ed.)*. (D. M. Jamin, Trans.) Jakarta: Erlangga

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1. Hasil Wawancara Kepada Anggota DPRD**

**Nama Informan: Muhammad Hatta Kainang, SH**

**Jabatan: Pimpinan Komisi II DPRD**

#### **Bagaimana tanggapan anda tentang fungsi pengawasan DPRD?**

1. Monitoring dan kunjungan lapangan, masukan dari public
2. Kroscek pada saat bertemu mitra ,Faktor yang menunjang proses kinerja dari DPRD
3. Dokumen proses pelaksanaan program, di dewan hanya mendapatkan dokumen RKA,menyangkut DPA tidak bsa akses tapi menyangkut proses lelang pengadaan barang dan jasa kami memantau melalui situs LPSE untuk mengetahui program sudah berjalan sesuai amanat

#### **Menurut anda faktor yang menghambat pelaksanaan perda?**

1. Tiap OPD terkadang tidak menjalankan SOP terhadap program kegiatan sehingga kadang mereka melakukan proses2 kroscek hanya mendapatkan narasi untuk mengedentifikasi
2. Regulasi pembahasan perda kadang menggunakan pp12 2019 kemudian menggunakan pemendagri 77, penjabaran dari PP12 jika kita di dewan rajin mengakses PP 12 Tahun 2019 kita dpt gambaran sejauh mana proses pembahasn perda tanpa mengedentifikasi menggunakan regulasi
3. Respon dan partisipasi eksekutif. Normal saja dan biasa saja semestinya tiap pembahsan RANPERDA APBD harusnya dijelaskan secara detail seharusnya menggunakan logika framework tapi tidak tercapai , mungkin

karena soal SDM dan persoalan manajemen sehingga sajian program itu tidak tersaji dalam bentuk logika framework. Kenapa penting menggunakan logika framework karena tiap program harus terukur dan mengetahui golnya seperti apa sehingga tim dapat dengan mudah mendapatkan gambaran melalui paparan itu bukan hanya persoalan menyerahkan RKA kita butuh kebenaran apa yang dimaksud di logika RKA dalam bentuk framework karena kalau tidak ada logika framework itu tidak tau apa yang menjadi output dan goal dari sebuah program sejauh mana perkembangan proses kerja yang dilaksanakan eksekutif

4. Catatan yang menjadi kritikan teman dewan kadang tidak tuntas terjawab kadang dijawab secara general seharusnya yang menjadi pertanyaan dewan itu di jawab secara spesifik sehingga jika ada problem itu tidak jadi masalah kadang tidak tuntas karena biasanya jawaban yang kita dapatkan hanya berupa narasi, yang sifatnya general tidak sesuai dengan keinginan dewan prinsip birokrasi di mana paradigma kinerja mau tidak mau menjadi tuntutan zaman bukan seperti dulu lagi, kedepannya BPK pun melakukan proses audit kinerja sejauh mana program itu punya dampak dan efek terhadap publik karena tuntutan zaman jadi mau tidak mau birokrasi harus seperti itu.

**Nama Responden: H. Taufiq Agus, SH**

**Fraksi: Golkar**

**Bagaimana menurut anda fungsi pengawasan DPRD terkait proses pembahasan PERDA?**

Pengawasannya dibagi dua yang pertama prapelaksanaanya artinya dalam pembangunan dan anggaranya sudah diawasi yang kedua pasca dilaksanakan kegiatan apakah sudah sesuai at belum baik dari segi kualitas at kuantitas maupun proses pelaksanaanya termasuk proses lelangya suatu kegiatan dalam perencanaanya terkait tugas dan fungsi kita ad yang d namakan akade dewan misalnya d komisi akan mengawasi mitra-mitra komisinya, kemudian di banggar juga untuk menyesuaikan hasil apakah sudah sesuai dengan anggaranya at belum, jadi badan anggaran tsb sudah masing-masing sesuai dengan komisi , komisi membahas item2 dan rencana apa yang ingin di bahas kalau di banggarnya menyediakan anggaran sesuai dengan mitra-mitranya yang ada di komisi.

**Faktor hambatan dalam proses pembahasan eksekutif sendiri?**

Faktor yang mendasar kepentingan antrara kepentingan eksekutif termasuk belanja oprasional, pegawai dan masyarakat yang diwakili oleh DPR disitu biasa terjadi selisihfaham terutama mengenai angka-angka, jadi sebenarnya anggaran saja seandanya anggaran saja tidak di batasi mungkin masalahnya tidak ada , jadi kadang-kadang kita tarikulur kepentingan eksekutif dan kepentinganya anggota DPR

**Bagaimana tingkat respon dan partisipasi eksekutif dalam proses pembahasan?**

Sudah bagus artinya apa yang menjadi pokok dari tiap pembahasan mereka sudah penuh, cuman kadang-kadang waktunya saja yang tidak tepat misalnya mereka memberikan data kepada DPR di luar waktu yang diberikan menurut UUD, persoalan waktu dan regulasi secara umum proses penyiapan pembahasan sampai monitoring dan evaluasi dilupakan seperti apa pengamatan DPRD khusus di Sulbar mulai dari perencanaan sampai pembahasan.

**Bagaimana tanggapan anda tentang kendala dalam proses pengawasan DPRD terkait penyusunan APBD Sulawesi Barat?**

Mulai dari proses perencanaan sampai pembahasan khusus di Sulbar ini kadang-kadang eksekutif itu menurut pengalaman mereka tidak mampu merealisasikan fakta dan dipertanggung jawabkan realisasi dimana mereka itu kadang-kadang kalau diukur waktu dan tahapannya sangat rendah serapannya karena itulah yang anggota DPRD harapkan harus memenuhi 3 unsur yang pertama ada dananya, awasi dananya, kedua ada kegiatannya, kegiatan apa yang mereka lakukan apakah bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Yang ketiga ada waktunya, apakah waktunya tepat atau tidak yang jadi masalah ini yang kita alami adalah waktunya karena mereka tidak pernah lakukan tepat waktu, jadi serapannya itu sangat rendah inilah jadi pokok padahal sudah punya 3 modal ada kegiatan, dana atau anggaran dan waktunya, tinggal persoalan waktu sehingga serapannya agak kurang.

**Lampiran 2. Wawancara Terhadap Eksekutif**

Nama: Murdanil, SE., M.AP

Jabatan/Instansi: Kabid BPKPD Provinsi Sulbar

**Kendala apa saja yang sering ditemui dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat?**

Terkait dengan proses ketersediaan dokumen selama ini eksekutif dalam menyampaikan seluruh dokumen perencanaan mulai dari rancangan hingga evaluasi sejalan dengan amanat dari kemendagri sesuai dengan pedoman APBD, dalam proses pembahasannya sejalan dan selaras walaupun proses pembahasannya dinamis dan ada pemikiran dari DPRD sendiri, melalui dapil dan akan di aspirasikan melalui APBD,

**Menurut pengamatan anda terkait proses pengawasan DPRD bersama eksekutif di lapangan apakah selama ini sudah berjalan dengan lancar mulai pembahasan diawal sama dengan pada proses SK pentapan evaluasi atau hasil terkait monitoring yang dilaksanakan?**

Pengawasan yang dilakukan DPRD sudah berjalan melalui tahapan pertanggung jawaban APBD yang sudah dibahas bersama

Lampiran 3. Wawancara Terhadap  
Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat

**Nama: Muhammad Yasir Fattah, SE, M.Si**

**Instansi: Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD**

**Terkait proses - proses pembahasan DPRD bersama eksekutif dalam hal ini bagaimana bentuk pengawasan DPRD terhadap proses pelaksanaan APBD diprovinsi sulbar yang kita dapatkan informasi bagaimana peran dari kepala**



**bagian penganggaran dan pengawasan dalam hal proses pelayanan kepada DPRD itu sendiri dalam proses pertanggung jawaban perda APBD provinsi sulbar?**

Pengawasan sektariat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitas pengawasan terhadap anggota dewan terhadap peanggaran kita bicara dasar mengacu pada dasar peraturan gubernur no.32 thn 2020 bagian fasilitas anggaran dan pengawasan mempunyai tugas pelaksanaan fasilitas dan kordinasi penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan administrasi perjalanna dinas dan pembuatan laporan kita lebih spesifik lagi dimana bagi memfasilitasi penanganan pengawasan adalah mengkordinir mengawasi komisi-komisi dalam memberikan pelayanan fasilitas dalam terhadap anggota dewan terkait dengan pekerjaannya terutama fungsi dan tugas utama DPRD adalah pengawasan, penganggaran dan legislasi, dalam hal ini bagianbfasilitas pengawasan mengkordinir teman-teman mulai kasubag, sampai dengan staff untuk memnerikan fasilitas pelayanan terhadap anggota dewan

**Bagaimana terkait peran ataupun partisipasi dari kepala bagian penganggaran fasilitas pengawasan terhadap proses pembahasan pelaksanaan perda yang dilaksanakan DPRD bersama eksekutif?**

Pengarahan pengawasan ini tidak terlepas dari rencana anggota dewan terutama dari hasil Bamus musyawarah disitu sudah terjadwal kegiatan anggota dewan dengan pihak eksekutif dimana jadwal-jadwal tersebut di situlah kami memberikan fasilitasi ketersediaan data dokumen dan harus dipastikan keteman-teman kasuba

dan staff-staff penanggungjawab dan kordinasi kordinator komisi untuk memastikan ketersediaan dokumen-dokumen tersebut hasil tapatnya, risalahnya dan lain-lain yang berarti disini fungsi pelayanan kesekretariatan pafa DPRD itu bagaimana memberikan fungsi pelayanan dalam hal ketersediaan dokumen ketersediaan draft dll. termasuk mungkin pak alat komunikasi antara DPRD dan eksekutif dalam hal pembahasannya.

**Dalam proses pembahasan baik itu ditingkat badan anggaran atau komisi ketika ada salah satu OPD yang tak hadir dalam proses pembahasan yang dimaksud dan anggota dewan sangat membutuhkan kehadirannya bagaimana bentuk komunikasi, kepada pihak eksekutif dalam sebagai kepala fasilitas peanggaran dan pengawasan?**

Dalam permasalahan tersebut ada beberapa cara kita hadapi artinya kita mengawali dulu dari undangan bahwa schedule kita untuk rapat dengan OPD dengan hal-hal ini, jam, tempat sudah diatur oleh tim adapun hambatan-hambatan OPD yang tidak bisa datang pada saat anggota dewan membutuhkan itu kami komunikasikan langsung dengan cara menelfon atau kita menggunakan zoom adapun OPD itu berada dimanapun kita bisa melaksanakan zoom mempertanyakan langsung antara kebutuhan dewan dengan OPD tersebut, fasilitas yang kami siapkan. pada intinya bahwa proses pembahasan yang sudah sesuai dengan disusun dengan jadwal kerja DPRD bersama eksekutif itu berjalan dengan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang sudah berlaku.

**Nama: Syahrudin, S.Ip**

**Jabatan/Instansi: Kasubag Fasilitasi Pengawasan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat**

**Bagaimana menurut bapak terkait proses pengawasan terhadap DPRD terhadap proses pembahasan perda yang dilaksanakan DPRD dan eksekutif dalam hal ini sebagai ASN yang ada di sekretariat DPRD kira-kira bentuk fungsi pelayanan yang bapak berikan terhadap proses pelaksanaan pembahasan itu seperti apa?**

Berbicara soal pelayanan secara keseluruhan bisa kita katakan fungsi utama sekretariat DPRD yang ada dilembaga DPRD fungsi utamanya adalah pelayanan terkait masalah pelayanan dan 3 bagian yang ada didalam sekretariat DPRD ada bagian umum dan keuangan,

1. Bagian persidangan
- 2 Perundang-undangan
3. Bagian penanggaran ,

misi peanggaran dan pengawasan, berbicara masalah peran, peran sekretariat DPRD dalam hal yang terkait dengan posisi saya pada fungsi pelayanan dalam hal pengawasan yang dilakukan DPRD tentu kita kalau bicara presentase, pada bagaian fasilitasi pengawasan itu lebih dominan memang pelayanan ada pada bagian fungsi penganggaran dan pengawasan dalam hal ini dominan AKD baik di bagian komisi badan anggaran dan badan kehormatan itu posisinya ada pada pengawasan anggaran secara peran tentu kita membackup semua kegiatan kedewanan yang dilakukan terhadap terkait pengawasannya dalam hal ini fasilitasi

yang kita berikan mulai dari komunikasi yang terbangun antara pihak eksekutif dan legislatif dalam hal rapat-rapat yang akan diselenggara DPR itu disini peran mediasi dalam hal penjadwalan dalam hal bahan olahan yang dijadikan bahan pokok pembahasan kemudian disamping itu tentu dalam hal ini fasilitas yang mendukung proses pembahasan yang dilakukan tapi titik beratnya adalah bahwa dalam hal ini pelayanan yang kita berikan itu dari segi pengawasan adalah semua kegiatan-kegiatan yang diselenggara oleh DPR terutama misalhnya salahsatu AKD, fungsi pengawasannya adalah komisi baik pada tingkat rapat yang diselenggarakan untuk pembahasan ditingkat bangkar atau komisi itu yang kita fasilitasi disamping itu secara internal dan secara eksternal kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh DPR yang dilakukan diluar kantor yang di selenggarakan oleh anggota dewan iti juga yangbikut serta kita fasilitasi dalam hal ini kita berikan pendampingan terhadap mereka untuk melaksanakan kunjunngan-kunjungan kerja sekira seperti itu.

**Bagaimana peran partisipasi dari pada eksekutif itu sendiri dalam proses pembahasan anggaran terhadap DPRD menurut pengamatan bapak itu sendiri seperti apa?**

Kurang lebih sama juga semua AKD ini sangat bergantung pada pembahasan apa yang mereka lakukan kalau terkait masalah pemahasan tingajt anggaran yang dilakukan pada anggaran maka ini yang kita komunikasikan lebih awal adalah penjadwalannya untuj mereke duduk bersama melakukan pembahasan dalam hal ini anggota DPR dan pihak-pihak APBD dan pihak eksekutif lagi-lagi kita mulai

ketersediaan bahan kemudian siapa-siapa terlibat proses pembahasan itu , itu semua yang mendukung proses pembahasan dan tentunya terkait pasal pembahasan ini tetap mengacu pada Renja yang ditetapkan di awal tahun kemudian Renja itu di breakdown pada tingkat yang lebih pasnya lagi dirapatkan dibadan musyawarah untuk melakukan tepatnya pembahasan dilakukan pada saat kapan? semua itu tentu peran kita sebagai fungsi sekretariat DPR memfasilitasi semua proses-proses yang mendukung terjadinya proses pembahasan yang dilakukan oleh tingkat komisi maupun tingkat anggaran yang menyangkut penganggarannya hingga hal ini berjalan berlangsung dari proses awal sampai proses tahapannya kurang lebih seperti itu.

**Mulai dari proses pembahasan awal sampai akhir komunikasi eksekutif dengan DPRD badan anggaran itu seperti apa komunikasinya?**

Ini tentu juga menjadi peran penting yang dilakukan pihak sekretariat dalam mediasi keduanya tentu kita harus menempatkan tentang penjadwalan tempat ini dalam waktu, karna dari satu pihak DPRD tentu mengkehendaki sewaktu daru mereka inginkan belum tentu sama keinginan yang dilakukan eksekutif sehingga kita mencari momentum yang bisa lakukan pembahasan secara bersama waktu yang mereka miliki sehingga tidak ada kendala dalam hal penentuan waktu pembahasan ealaupun itu secara regulasi di tentukan jadwalnya momentum yang pasnya didalam waktu yang tepat ya, itu tentu ada kesamaan waktu yang diperlukan bersama peran sekretariat DPRD ini memediasikan mengkomunikasiakn semua itu sehingga ini ada kesepakatan yang mereka bangun

kapan mereka bisa melakukan pembahasan itu dan saya rasa selama ini itu cukup baik dan tidak ada masalah.

**Apakah proses pembahasan selama ini antara DPRD dan eksekutif terkait pelaksanaan peran itu berjalan sesuai mekanisme harapan kita bersama?**

Kaitannya dengan kondisi sekarang ini akan tentu berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya dikarenakan kondisinya sekarang ini kita berada pada suasana pandemi, bisa juga tingkat kehadiran dewan yang tentunya kondisinya itu juga bagian kerja kami untuk memfasilitasi. Sistem proses pembahasan berjalan beriringan dengan jadwal atau rencana kerja yang dilaksanakan pembahasan industri meskipun pembahasannya masih terdapat terhadap beberapa kendala tapi sejauh ini itu bisa diselesaikan sesuai waktu ditentukan, kalau dikatakan itu kendala itu bukan kendala yang merupakan sebuah dinamika dalam sebuah proses pembahasan yang perlu dilakukan sinkronisasi menjadi 2 fikiran dari DPRD itu sendiri dan apa menjadi konsep mendorong oleh pihak eksekutif.